

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar belakang

BAPPEDA Kota Solok adalah salah satu perangkat daerah di Kota Solok yang memiliki tugas untuk melaksanakan fungsi perencanaan dalam hal pembangunan daerah. Dengan adanya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Solok, diharapkan keberadaannya untuk menyusun dan melaksanakan pembangunan secara merata dan adil dengan otonomi yang seluas-luasnya.

Indonesia sebagai negara berkembang yang merupakan salah satu negara yang tergabung dalam kelompok Negara-negara Asia Tenggara (*Association South East of Asian Nation*) merupakan negara yang dalam tingkat perkembangannya ekonominya belum begitu mapan. Bahkan ada para ahli ekonomi mengatakan, negara Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN dalam tingkat persaingan ekonomi masih ketinggalan banyak jika dibandingkan dengan negara anggota ASEAN yang lain. Sebelum tahun 1997, sebenarnya banyak pihak memuji prestasi pembangunan ekonomi Indonesia sebagai salah satu *High Performing Asian Economy Countries* yang memiliki kinerja perekonomian yang sangat mengagumkan, bahkan ada yang menganggapnya sebagai miracle, tetapi karena hantaman krisis ekonomi yang berawal dari depresi rupiah pada bulan Juli 1997, semua keajaiban itu menjadi sirna dan terseok-seok dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan, sampai sekarang belum pulih kembali.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Provinsi, dan Provinsi itu dibagi atas Kabupaten atau Kota, tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur Undang-Undang. Hal ini memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menjalankan Otonomi Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dipandang sebagai mitra kerja yang terkait karena consensus yang disepakati bersama dan diakui adil oleh masyarakatnya. Otonomi Daerah merupakan amanat rakyat yang diharapkan akan menjadi persyaratan bagi terciptanya upaya pembangunan yang adil, demokratis dan mengikutsertakan peran serta aktif masyarakat disegala tingkatan dalam segala aspek.

BAPPEDA berperan sebagai unit organisasi perencanaan, dimana keberadaannya sangat diharapkan untuk melaksanakan otonomi di bidang perencanaan pembangunan daerah secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan perencanaan yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan. Dengan demikian pembangunan dapat memberikan aspek positif yang lebih besar dan dapat mengantisipasi serta menekan dampak negatif sekecil mungkin. Untuk itu Bappeda dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Suatu perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan oleh daerah karena bertujuan untuk memaksimalkan pembangunan dan mengoptimalkan pengelolaan pembangunan di daerah tersebut. Selain itu juga untuk mengoptimalkan potensi yang ada di daerah dan mengurangi masalah pembangunan daerah yang sudah terjadi dari tahun tahun sebelumnya. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu

daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi yang (economic entity) yang didalamnya terdapat berbagai uraian mengapa intervensi pemerintah diperlukan.

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan. Akhir dari pembangunan adalah tercapainya tujuan pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat melakukan proses pembangunan, diperlukan suatu perencanaan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Berdasarkan pertanyaan dan isu tersebut, tujuan, arah, dan prioritas pembangunan ditentukan dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan adalah proses menentukan tindakan yang tepat di masa depan melalui serangkaian keputusan yang mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Rencana pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, inklusif, dan responsif terhadap perubahan.

Rencana pembangunan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin antarwilayah, tata ruang, time lapse, fungsi pemerintahan, keterpaduan, sinkronisasi dan kreasi sinergis antara instansi pusat dan daerah, perencanaan dan penganggaran. Tujuannya untuk menjamin konektivitas dan konsistensi antar pelaksanaan. , Dan pemantauan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, adil dan berkelanjutan. Rencana pengembangan membuat rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Hal ini dilakukan oleh unsur pemerintah negara bagian dan

pemerintah daerah di tingkat pusat dan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

BAPPEDA Kota Solok Sebagai badan yang ditugaskan untuk menyusun dokumen perencanaan seperti, RPJPD, RPJMD dan RKPD. Serta menyusun Renstra SKPD dan Renja SKPD. Perencanaan pembangunan daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Di tingkat perangkat daerah, disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) yang merupakan rencana perangkat daerah lima tahunan.

Wabah corona memaksa semua negara untuk merevisi perencanaan pembangunan mereka. Target disesuaikan secara realistis, asumsi diubah sesuai keadaan sekarang dan prioritas program jangka pendek dialihkan sebagian besar untuk mengatasi epidemic covid-19. Dampak social dan ekonomi yang melanda Indonesia akibat pandemic ini memaksa level pemerintahan baik pusat dan daerah untuk melakukan koreksi terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Terutama yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran mengingat pada saat menyusun sama sekali tidak memperhitungkan pandemic. Penyesuaian yang tepat dan kebijakan yang terukur dalam menangani wabah corona akan menjadi titik awal untuk pemulihan. Pemerintah Indonesia sendiri baru merampungkan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ketika pandemi Covid-19 mulai menyebar keseluruh dunia, yang dituangkan

Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 pada tanggal 14 Februari 2020. Dokumen yang menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan untuk masa 5 tahun kedepan itu disusun ketika Indonesia belum punya catatan kasus Covid-19, sehingga seluruh asumsi yang melandasinya berdasarkan keadaan normal.

Berdasarkan masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Oleh BAPPEDA Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kota Solok Pada Masa Pandemi”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Sebagaimana latar belakang masalah yang dituliskan di atas, maka dirumuskan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana proses penyusunan Perencanaan Pembangunan pada BAPPEDA Kota Solok
2. Bagaimana peran BAPPEDA Kota Solok dalam Perencanaan Pembangunan?
3. Dokumen apa saja yang dibuat BAPPEDA Kota Solok?

### **1.3 Tujuan Magang**

Adapun tujuan magang adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui mekanisme penyusunan Perencanaan Pembangunan pada BAPPEDA Kota Solok
2. Untuk mengetahui peranan BAPPEDA Kota Solok dalam Perencanaan Pembangunan.
3. Untuk Mengetahui dokumen apa saja yang dibuat oleh BAPPEDA Kota Solok.

## **1.4 Manfaat Magang**

### **1.4.1 Bagi Mahasiswa**

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang proses perencanaan pembangunan daerah di BAPPEDA Kota Solok.
2. Mendapatkan pengalaman kerja serta permasalahan yang sering ditemui serta pemecahan masalahnya.
3. Mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan selama perkuliahan ke dalam dunia kerja.
4. Membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab dalam dunia kerja.

### **1.4.2 Bagi Universitas Andalas**

1. Menjalin kerjasama serta hubungan baik antara Universitas Andalas dengan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Solok.
2. Meningkatkan kualitas lulusan Universitas Andalas melalui pengalaman kerja magang, sehingga Universitas Andalas semakin dikenal oleh masyarakat luas dan dunia kerja.
3. Mempromosikan Diploma III Keuangan Negara yang berkualitas serta siap dan mampu bersaing dengan khalayak umum dimanapun berada.

### **1.4.3 Bagi Instansi**

1. Mampu membina kerja sama antara instansi dengan lembaga pendidikan.
2. Memberikan kontribusi langsung terhadap pekerjaan karyawan di instansi tersebut.

3. Memberikan kontribusi yang baik terhadap mahasiswa magang sebagai bentuk partisipasi nyata yang diberikan oleh instansi.
4. Menjadi penunjang untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

## **1.5 Metode Penulisan**

### **1.5.1 Metode Pengumpulan Data**

Ada 2 metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu :

#### **1. Studi Keperustakaan**

Dengan cara pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan mendapatkan dari buku-buku serta tulisan tulisan yang berkaitan dengan masalah.

#### **2. Studi Lapangan**

##### **1. Data Primer**

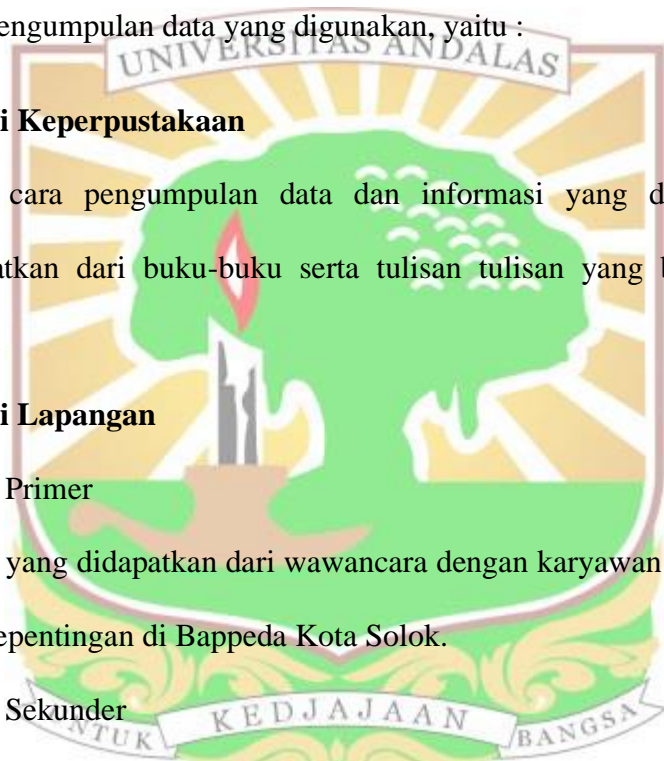
Data yang didapatkan dari wawancara dengan karyawan dan pejabat yang berkepentingan di Bappeda Kota Solok.

##### **2. Data Sekunder**

Data berupa laporan mengenai aktivitas yang berhubungan dengan objek yang dibahas.

### **1.5.2 Metode Analisa Data**

Ada 2 metode analisa data yang digunakan, yaitu :



## 1. Metode Kualitatif

Dalam analisa ini akan digunakan teori-teori yang ada dalam literature dengan masalah yang dibahas.

## 2. Metode Kuantitatif

Dalam analisa ini akan digunakan analisa regresi dan kolerasi untuk dapat melihat pengaruh serta hubungan yang ada di dalam permasalahan.

### 1.6 Tempat dan Waktu Magang

Dalam melaksanakan kegiatan magang ini penulis melakukan magang pada kantor Bappeda Kota Solok selama 40 hari kerja.

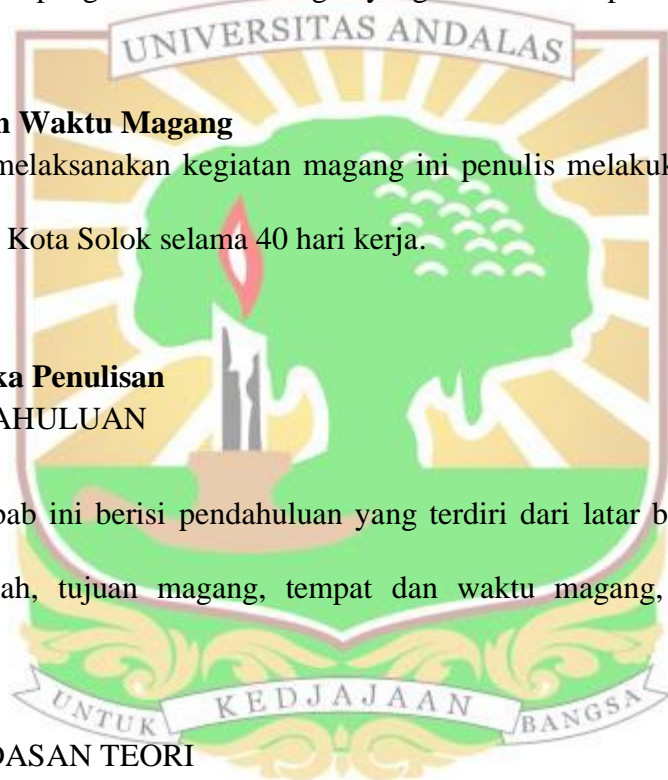
### 1.7 Sistematika Penulisan

#### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan.

#### BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisikan tentang BAPPEDA, konsep perencanaan pembangunan, tahapan dan siklus perencanaan pembangunan, dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, keterkaitan antar dokumen perencanaan, serta proses dan mekanisme penyusunan rencana pembangunan.



### BAB III : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Dalam bab ini berisikan tentang sejarah ringkas BAPPEDA Kota Solok, tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kota Solok, Visi dan Misi BAPPEDA Kota Solok, dan struktur beserta tugas dan fungsi organisasi BAPPEDA Kota Solok.

### BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan tentang proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah di BAPPEDA Kota Solok, dokumen perencanaan pembangunan yang dibuat oleh BAPPEDA Kota Solok dan kendala yang dihadapi BAPPEDA Kota Solok dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kota Solok.

### BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

